

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099075/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

**Revisi ke 04**  
Tanggal : 08 Juli 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (29) BANTEN
- 4. Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG
- Sebesar : Rp. 94.268.000 ( SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 94.268.000  
Rp. 94.268.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |            |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 94.268.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        | Rp. |            | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan             | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |            | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0          | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0          | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0          | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN RANGKASBITUNG (161) Rp. 94.268.000

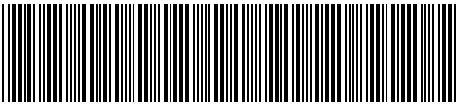
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUDARTO  
NIP. 196904091989121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026**  
**I A. INFORMASI KINERJA**

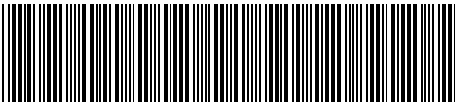


DS:1365-0430-6794-3743

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

|                            |   |           |                                                                                                                                                                                                     |            |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Program                    | : | 005.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                                                                                                                                                               | 94.268.000 |
| Kegiatan                   | : | 1049      | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                                                                                                                                                | 94.268.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01     | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum                                                                      |            |
|                            |   | 2. 01     | Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu                                                                                                        |            |
|                            |   | 3. 01     | Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum                                                                                                               |            |
|                            |   | 4. 01     | Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum                                                                                                                               |            |
|                            |   | 5. 01     | Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum                                                                                                                              |            |
|                            |   | 6. 01     | Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum                                                                                                       |            |
|                            |   | 7. 02     | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum                                                                                 |            |
|                            |   | 8. 02     | Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu                                                                                                        |            |
|                            |   | 9. 02     | Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum                                                                                                          |            |
|                            |   | 10. 03    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum                                         |            |
|                            |   | 11. 04    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum                                      |            |
|                            |   | 12. 05    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum |            |
|                            |   | 13. 06    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum           |            |
|                            |   | 14. 07    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum                                                                                  |            |
|                            |   | 15. 08    | Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum                                                                                                  |            |
|                            |   | 16. 09    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum                                                                      |            |
|                            |   | 17. 10    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi                                                                                                                    |            |
|                            |   | 18. 11    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi                                                                                                               |            |
|                            |   | 19. 12    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court                                                                                                                 |            |
|                            |   | 20. 13    | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                                                         |            |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1365-0430-6794-3743

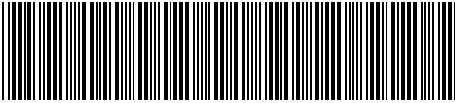
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

|                                      |     |    |                                                                                                          |                                                                                         |        |                         |  |  |            |
|--------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--|--|------------|
| Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |     |    |                                                                                                          |                                                                                         |        |                         |  |  |            |
|                                      | 21. | 14 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)         |                                                                                         |        |                         |  |  |            |
|                                      | 22. | 15 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court |                                                                                         |        |                         |  |  |            |
| Klasifikasi Rincian Output           | 1   | :  | 1049.AEA                                                                                                 | Koordinasi                                                                              | 2,00   | kegiatan                |  |  | 750.000    |
| Rincian Output                       | :   | 01 | AEA.001                                                                                                  | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | 2.00   | kegiatan                |  |  | 750.000    |
| Klasifikasi Rincian Output           | 2   | :  | 1049.BCA                                                                                                 | Perkara Hukum Perseorangan                                                              | 224,00 | Perkara, Berkas Perkara |  |  | 56.798.000 |
| Rincian Output                       | :   | 01 | BCA.U03                                                                                                  | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat                     | 224.00 | Perkara                 |  |  | 56.798.000 |
| Klasifikasi Rincian Output           | 3   | :  | 1049.QBA                                                                                                 | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan                                                      | 60,00  | Orang                   |  |  | 36.000.000 |
| Rincian Output                       | :   | 01 | QBA.032                                                                                                  | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)                             | 60.00  | Orang                   |  |  | 36.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output           | 4   | :  | 1049.QCA                                                                                                 | Perkara Hukum Perseorangan                                                              | 2,00   | Perkara, Berkas Perkara |  |  | 720.000    |
| Rincian Output                       | :   | 01 | QCA.001                                                                                                  | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)          | 2.00   | Perkara                 |  |  | 720.000    |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
I B. SUMBER DANA



DS:1365-0430-6794-3743

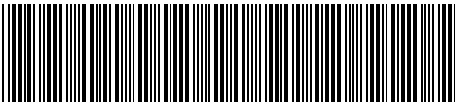
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

|                                |     |            |       | Pagu                                     |      | Ekuivalen Rupiah |     |                       |
|--------------------------------|-----|------------|-------|------------------------------------------|------|------------------|-----|-----------------------|
| 1. Anggaran Tahun 2026         | Rp. | 94.268.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | 0                | Rp. | 0                     |
| 1. Rupiah Murni                | Rp. | 94.268.000 |       | (2) RPLN                                 | US\$ | 0                | Rp. | 0                     |
| 2. PNPB                        | Rp. |            |       | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing    | US\$ | 0                | Rp. | 0                     |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri  | Rp. | 0          |       | (2) RHLN                                 | US\$ | 0                | Rp. | 0                     |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0          |       | c. Pinjaman Dalam Negeri                 | IDR  | 0                |     |                       |
| 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0          |       | d. Hibah Dalam Negeri                    | IDR  | 0                |     |                       |
| 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0          |       | e. Hibah Luar Negeri Langsung            | IDR  | 0                |     |                       |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah :  |     |            |       | f. Hibah Dalam Negeri Langsung           | IDR  | 0                |     | (dalam ribuan rupiah) |

(dalam ribuan rupiah)

| No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH<br>No. NPP/H per Tahun<br>No. Register |        | PAGU TAHUN INI |      | RINCIAN DANA BERDASARKAN<br>CARA PENARIKAN |      | DANA PENDAMPING |       |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------------------------|------|-----------------|-------|-------------|
|     | Kode                                                             | Uraian | Kode           | Dana | Kode                                       | Dana | Rp. Pdp         | Rp.LN | Rp.Loc.Cost |
| 1   | 2                                                                | 3      | 4              | 5    | 6                                          | 7    | 8               | 9     | 10          |
|     |                                                                  |        |                |      |                                            |      |                 |       |             |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



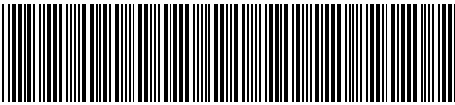
DS:1365-0430-6794-3743

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE      | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA                    | BELANJA         |                |               |                           |                   |                        | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|           |                                                                   | PEGAWAI<br>[51] | BARANG<br>[52] | MODAL<br>[53] | BANTUAN<br>SOSIAL<br>[57] | LAIN-LAIN<br>[58] | JUMLAH<br>SELURUH<br>8 |                 |                                |
| 1         | 2                                                                 | 3               | 4              | 5             | 6                         | 7                 | 8                      | 9               | 10                             |
| 099075    | PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG                                  | -               | 94.268         | -             | -                         | -                 | 94.268                 | 29 . 03         |                                |
| 005.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum                             | -               | 94.268         | -             | -                         | -                 | 94.268                 |                 |                                |
| 1049      | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                              | -               | 94.268         | -             | -                         | -                 | 94.268                 |                 |                                |
| 1049.AEA  | Koordinasi<br>(29.03 BANTEN / KAB. LEBAK)                         | -               | 750            | -             | -                         | -                 | 750                    |                 |                                |
| 01        | RM                                                                | -               | 750            | -             | -                         | -                 | 750                    |                 |                                |
| 1049.BCA  | Perkara Hukum Perseorangan<br>(29.03 BANTEN / KAB. LEBAK)         | -               | 56.798         | -             | -                         | -                 | 56.798                 |                 |                                |
| 01        | RM                                                                | -               | 56.798         | -             | -                         | -                 | 56.798                 |                 |                                |
| 1049.QBA  | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan<br>(29.03 BANTEN / KAB. LEBAK) | -               | 36.000         | -             | -                         | -                 | 36.000                 |                 |                                |
| 01        | RM                                                                | -               | 36.000         | -             | -                         | -                 | 36.000                 | 161             |                                |
| 1049.QCA  | Perkara Hukum Perseorangan<br>(29.03 BANTEN / KAB. LEBAK)         | -               | 720            | -             | -                         | -                 | 720                    | 29 . 03         |                                |

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1365-0430-6794-3743

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG  
Kewenangan : (KD)

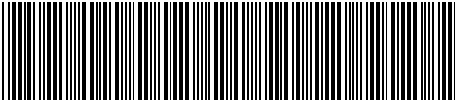
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE   | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA | BELANJA   |           |           |                   |           |                   | LOKASI/<br>KPPN | CARA<br>PENARIKAN/<br>REGISTER |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
|        |                                                | PEGAWAI   | BARANG    | MODAL     | BANTUAN<br>SOSIAL | LAIN-LAIN | JUMLAH<br>SELURUH |                 |                                |
| 1      | 2                                              | [51]<br>3 | [52]<br>4 | [53]<br>5 | [57]<br>6         | [58]<br>7 | 8                 | 9               | 10                             |
| 01 RM  |                                                | -         | 720       | -         | -                 | -         | 720               | 161             |                                |
| JUMLAH |                                                | -         | 94.268    | -         | -                 | -         | 94.268            |                 |                                |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1365-0430-6794-3743

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (099075) PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

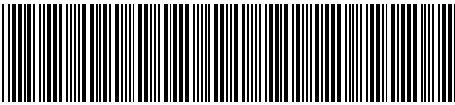
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE   | URAIAN SATKER                        | RENCANA PENARIKAN |          |       |       |       |       |       |         |           |         |          |          | JUMLAH<br>SELURUH |
|----|--------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
|    |        |                                      | JANUARI           | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI   | JUNI  | JULI  | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |                   |
| 1  | 2      | 3                                    | 4                 | 5        | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11      | 12        | 13      | 14       | 15       | 16                |
| 1. | 099075 | PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG     |                   |          |       |       |       |       |       |         |           |         |          |          |                   |
|    |        | RENCANA PENARIKAN DANA               | 3.000             | 7.849    | 7.502 | 8.926 | 8.916 | 9.000 | 9.000 | 9.000   | 9.000     | 7.040   | 7.040    | 7.995    | 94.268            |
|    |        | BELANJA BARANG                       | 3.000             | 7.849    | 7.502 | 8.926 | 8.916 | 9.000 | 9.000 | 9.000   | 9.000     | 7.040   | 7.040    | 7.995    | 94.268            |
|    |        | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 3.000             | 7.849    | 7.502 | 8.926 | 8.916 | 9.000 | 9.000 | 9.000   | 9.000     | 7.040   | 7.040    | 7.995    | 94.268            |
|    |        | 52 BELANJA BARANG DAN JASA           | 3.000             | 7.849    | 7.502 | 8.926 | 8.916 | 9.000 | 9.000 | 9.000   | 9.000     | 7.040   | 7.040    | 7.995    | 94.268            |
|    |        | PERKIRAAN PENERIMAAN                 | 2.262             | 2.262    | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262   | 2.262     | 2.262   | 2.212    | 3.070    | 27.902            |
|    |        | - PNBP (425231)                      | 0                 | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0         | 0       | 0        | 10       | 10                |
|    |        | - PNBP (425233)                      | 562               | 562      | 562   | 562   | 562   | 562   | 562   | 562     | 562       | 562     | 512      | 553      | 6.685             |
|    |        | - PNBP (425239)                      | 1.700             | 1.700    | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700   | 1.700     | 1.700   | 1.700    | 2.507    | 21.207            |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
IV A. B L O K I R



DS:1365-0430-6794-3743

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [29] BANTEN  
Kode dan Nama Satker : [099075] PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

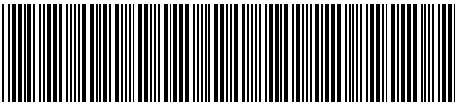
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099075/2026  
IV B. C A T A T A N



DS:1365-0430-6794-3743

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [29] BANTEN  
Kode dan Nama Satker : [099075] PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
|      |        |      |        |

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.  
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.  
NIP. 196805231992121002